

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, 1978, *Peranan Peraturan perundang-undangan dalam pembinaan hukum nasional*, Bandung: Armico.
- I Dewa Gede Atmadja, 2017, *Ilmu negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, Malang: Setara Pers.
- Jimly Asshiddiqie, 1999, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.*
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Maria Farida Indrati, 2008, *Laporan Kompodium Bidang Perundang-Undangan*, Jakarta, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.
- _____, Soepranto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, 2012, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- M.P. Stein dalam Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-9*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soetandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto (Soekanto 1), 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

_____, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

_____ dan Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Tata Cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

C. Jurnal

A. Hamid S. Attamimi, Materi Muatan perundang-undangan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 15, Februari 1985.

Beni Kharisma Arrasuli, 2019, "*Konstitusionalisme bernegara dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi*", Jurnal Esiklopediaku, Vol. 1 No. 2, Juni, 2019.

Fadjar Laksono Soeroso, "*Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*", Jurnal Yudisial Vol. 6, No. 3 Desember 2013.

_____, dkk, 2013, *implikasi dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 tentang SBI atau RESBI*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, Nomor 4, Desember 2013

Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, 2019, "*Karakteristik Judicial order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima*", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019.

Jimly Asshiddiqie, 1999, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI*

Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat," Jurnal Konstitusi Vol. 6, No. 1, 2009.

M. Lutfi Chakim, "*Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi*", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015.

D. Internet

Kanal berita Liputan 6, Jimly Ashiddiqie: surat dari ketua Mahkamah Konstitusi bisa timbulkan salah tafsir www.liputan6.com

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi, www.mkri.id

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Program Legislasi Nasional, www.dpr.go.id,

